



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kepala Badan Pelaksana BNPB
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 13 Juli 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Kinerja & Anggaran Program Penanggulangan Pandemi Covid 19. 2. Isu-isu Aktual dan Solusinya.
Ketua Rapat	: DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 49 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 2 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala Badan Pelaksana BNPB RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 12.27 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi Ketua Komisi VIII H.Yandri Susanto, S.Pt, Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan agenda “**Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Penanggulangan Pandemi Covid-19, Isu-isu Aktual dan Solusinya**” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Kepala BNPB untuk lebih mengefektikan lagi kinerja, program dan anggarannya dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk melaporkan secara rinci penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 (di luar pembelian APD).
3. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Menambah jumlah *PCR test* Covid-19 menjadi sebanyak 30.000 orang per hari secara masif dan merata di seluruh Indonesia.
 - b. Meningkatkan mitigasi dan sosialisasi pencegahan Covid-19 untuk memastikan bahwa kurva penyebaran Covid-19 tidak terus berkembang dan dapat segera mengalami penurunan.
 - c. Menggunakan istilah atau kosa kata yang mudah dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia dengan menghindari kosa kata asing yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
 - d. Memberikan jaminan bahwa pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah-sekolah dapat segera dilaksanakan secara bertahap dengan menerapkan protokol Covid-19.
 - e. Memastikan implementasi biaya *rapid test* maksimal sebesar Rp150.000 (*seratus lima puluh ribu*) per orang.
 - f. Mendorong upaya penanggulangan Covid-19 dapat berjalan secara beriringan antara menegakan protokol kesehatan dengan menumbuhkan ekonomi masyarakat.
 - g. Mengakselerasi penelitian atas vaksin atau anti virus Covid-19 untuk penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

- h. Mempercepat pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,



DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si